

## ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dimas Hariska Putra<sup>1</sup>, Jasiah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: [dimashariska4@gmail.com](mailto:dimashariska4@gmail.com)<sup>1</sup>, [jasiah@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:jasiah@uin-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This study seeks to examine the dynamics of educational political policies and their measurable influence on educational quality in Indonesia. Employing a qualitative approach through library research methodology, this investigation draws upon a range of scientific journals and official educational policy documents. The findings reveal that political dimensions embedded within educational policy formulation play a decisive role in shaping both the direction and the overall quality of the national education system, particularly in the domains of curriculum development, institutional financing, and quality assurance standards. Nevertheless, the practical implementation of such policies continues to encounter persistent obstacles, including pronounced interregional disparities in educational quality, inadequate resource allocation, and a lack of sustained policy consistency. Furthermore, the pervasive influence of political interests in the policy-making process frequently compromises the effectiveness of educational interventions. Accordingly, this study advocates for more adaptive, contextually grounded, and consistently applied policy frameworks, alongside strengthened governance mechanisms and systematic improvement of human resource competencies, as indispensable prerequisites for realizing equitable and high-quality education across Indonesia..*

**Keywords:** *Education Policy; Political Policy; Quality Of Education; Public Policy; Indonesia.*

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan menelaah dinamika kebijakan politik pendidikan serta pengaruhnya yang terukur terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), penelitian ini memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan sebagai sumber data utama. Hasil analisis mengungkapkan bahwa dimensi politik yang melekat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan memegang peranan determinatif dalam menentukan arah sekaligus kualitas sistem pendidikan nasional, khususnya dalam ranah pengembangan kurikulum, pembiayaan kelembagaan, dan penerapan standar penjaminan mutu. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih berhadapan dengan berbagai hambatan yang bersifat struktural, di antaranya kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah yang mencolok, ketidakcukupan alokasi sumber daya, serta lemahnya konsistensi dalam penerapan kebijakan secara berkesinambungan. Lebih jauh, pengaruh kepentingan politik yang meresap ke dalam proses pengambilan keputusan di

bidang pendidikan kerap menggerus efektivitas intervensi kebijakan yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya kerangka kebijakan yang lebih adaptif, berbasis konteks lokal, dan diterapkan secara konsisten, disertai penguatan mekanisme tata kelola serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis, sebagai prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan; Politik Pendidikan; Kualitas Pendidikan; Kebijakan Publik; Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan sejatinya merupakan pilar terpenting dalam kerangka pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi, realitas kualitas pendidikan di Indonesia masih dibayangi oleh berbagai permasalahan yang sifatnya kompleks dan berlapis. Fakta bahwa ketimpangan antara satu wilayah dan wilayah lainnya masih terasa kentara, diiringi oleh disparitas kompetensi tenaga pendidik serta minimnya fasilitas yang memadai, mengindikasikan bahwa ragam kebijakan yang selama ini diterapkan belum mampu secara efektif mendongkrak mutu pendidikan secara menyeluruh dalam skala nasional. Di sisi lain, perubahan-perubahan kebijakan yang kerap terjadi tanpa didahului oleh evaluasi yang mendalam justru berpotensi melemahkan stabilitas sistem pendidikan yang tengah dibangun.

Deretan persoalan tersebut sejatinya tidak terlepas dari kuatnya cengkeraman pengaruh politik dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan. Kebijakan yang lahir dari proses tersebut cenderung lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan sesaat daripada kebutuhan nyata akan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan (Jasiah, 2023). Kondisi semacam ini semakin diperparah oleh lemahnya penegakan standar nasional pendidikan, termasuk dalam konteks desentralisasi, mengingat kapasitas dan kondisi yang sangat bervariasi di tiap-tiap daerah (Jasiah, 2020).

Berbagai kajian sebelumnya telah menyoroiti isu kebijakan politik pendidikan dari beragam sudut pandang. Aziz (2020) mengidentifikasi sejumlah model analisis kebijakan pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk memahami proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sari (2023) mengkaji penerapan kebijakan pendidikan di Indonesia dan menemukan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan menjadi salah satu titik kritis yang kerap luput dari perhatian. Adapun Tintingon (2023) mendokumentasikan berbagai problematika yang melingkupi perubahan kebijakan pendidikan yang terus berulang tanpa dilandasi evaluasi yang

sungguh-sungguh. Berbeda dari kajian-kajian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan hubungan antara dinamika politik dalam pembentukan kebijakan dan dampak nyatanya terhadap kualitas pendidikan Indonesia sebagai fokus utama analisis.

Atas dasar itulah, penelitian ini berusaha menganalisis secara holistik kebijakan politik pendidikan yang berlaku di Indonesia, menilai implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi sejauh mana dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan berbagai tantangan yang menghambat jalannya implementasi kebijakan dan menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyatukan analisis kebijakan, dimensi politik, dan aspek kualitas pendidikan dalam satu bingkai kajian yang terintegrasi dan komprehensif dalam konteks Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibangun di atas pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pilihan pendekatan ini didasari pertimbangan bahwa studi kepustakaan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena kebijakan yang bersifat multidimensi dan sangat terikat pada konteks tertentu. Sumber data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan, meliputi kajian kebijakan pendidikan, model-model kebijakan, isu-isu otonomi daerah, dan standar mutu pendidikan nasional. Keseluruhan sumber tersebut dipilah secara selektif berdasarkan tiga kriteria utama: relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran informasi yang terkandung di dalamnya, guna menjamin kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik analisis dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengevaluasi literatur yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Proses analisis data selanjutnya menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metodologi analisis konten, yang meliputi tiga tahapan berurutan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demi menjamin validitas temuan yang dihasilkan, triangulasi sumber diterapkan dengan cara membandingkan berbagai referensi yang relevan satu terhadap yang lainnya, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses triangulasi ini turut mempertimbangkan

keberagaman jenis sumber yang digunakan, mulai dari jurnal ilmiah dan karya akademik hingga dokumen kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, artikel ini bertumpu pada 28 sumber referensi yang terdiri dari 23 jurnal ilmiah dan artikel akademik, 3 buku, serta 2 dokumen kebijakan pendidikan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Keberagaman komposisi sumber referensi ini mencerminkan komitmen penelitian untuk membangun analisis yang tidak hanya komprehensif dan berpijak pada bukti-bukti ilmiah, tetapi juga berakar pada landasan yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik nasional yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam amanat undang-undang. Kebijakan ini menjangkau berbagai dimensi sekaligus, meliputi pengembangan kurikulum, mekanisme pembiayaan, tata kelola kelembagaan, hingga penetapan standar mutu pendidikan. Dinamika perubahan kurikulum yang terus berlangsung dari masa ke masa sejatinya mencerminkan respons terhadap kebutuhan adaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman, sekaligus merupakan ikhtiar untuk melindungi dunia pendidikan dari intervensi kepentingan politik yang berlebihan (Jasiah, 2016).

Dalam perspektif yang lebih luas, arah kebijakan pendidikan Indonesia juga dikaitkan dengan visi jangka panjang Indonesia 2045, yang memposisikan pendidikan berkualitas tinggi sebagai pondasi utama agenda pembangunan bangsa (Nugroho, 2017; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terhubung erat dengan dinamika pembangunan nasional dan kepentingan-kepentingan politik yang lebih besar. Oleh sebab itu, setiap upaya menganalisis kebijakan pendidikan tidak dapat mengabaikan pemahaman terhadap dinamika politik yang melatarbelakangi dan membentuknya (Jasiah, 2021).

## **B. Analisis Implementasi Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia memperlihatkan adanya celah yang cukup dalam antara perencanaan yang digagas di tingkat pusat dan pelaksanaan yang terjadi di tingkat daerah. Kebijakan yang ditetapkan secara nasional kerap tidak berjalan sebagaimana diharapkan ketika bersentuhan dengan realitas lapangan. Kesenjangan ini bersumber dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain perbedaan kapasitas sumber daya manusia antardaerah yang signifikan, keterbatasan infrastruktur yang tersedia, serta lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat (Jasiah, 2020).

Lebih dari itu, pergantian kebijakan yang berlangsung dalam tempo yang relatif cepat tanpa diimbangi oleh evaluasi yang memadai turut melahirkan ketidakstabilan dalam ekosistem pendidikan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kemampuan tenaga pendidik untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi, sehingga implementasi kebijakan di lapangan menjadi tidak efektif dan tidak optimal (Jasiah, 2019). Sejumlah penelitian lain juga memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa lemahnya efektivitas pengawasan dan evaluasi kebijakan merupakan faktor penyebab utama yang menghambat jalannya implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh (Sari, 2023; Wahab, 2021).

## **C. Pengaruh Kebijakan terhadap Kualitas Pendidikan**

Kebijakan pendidikan terbukti memberikan dampak yang substansial terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak tersebut belum terwujud secara merata di seluruh penjuru wilayah. Kesenjangan kualitas pendidikan masih tampak jelas antara kawasan perkotaan dan pedesaan, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas pembelajaran, tingkat aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik yang tersedia di masing-masing daerah (Jasiah, 2017).

Upaya standarisasi mutu melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan secara menyeluruh, lantaran berhadapan dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam di berbagai wilayah Indonesia (Jasiah, 2024). Di sisi lain, kemajuan teknologi sebetulnya membuka peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem pembelajaran. Namun demikian, penerapan teknologi

tersebut di sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada tahap yang sangat awal (Siahaan, 2020; Kemendikbudristek, 2022).

## **D. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi**

Inkonsistensi kebijakan, kelangkaan sumber daya, dan politisasi pendidikan merupakan tiga isu dominan yang paling sering muncul dalam perdebatan seputar politik pendidikan di Indonesia. Dalam sejumlah kasus, kebijakan pendidikan masih sangat kental diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik yang sedang bermain, sehingga fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan secara objektif kerap terdesak ke pinggiran (Jasiah, 2022). Kondisi ini secara jelas mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan belum sepenuhnya terbebas dari tekanan kepentingan politik yang bersifat jangka pendek.

Implementasi otonomi daerah di sektor pendidikan juga belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan pada saat kebijakan tersebut digulirkan. Perbedaan kapasitas yang sangat mencolok antardaerah menyebabkan terjadinya ketimpangan yang nyata dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di masing-masing daerah (Jasiah, 2022). Situasi ini semakin diperparah oleh distribusi bahan ajar berkualitas yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri secara merata. Birokrasi yang cenderung berlapis dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan pun menjadi hambatan nyata yang menghalangi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh (Sari, 2023; Hasbullah, 2015).

## **E. Solusi dan Rekomendasi Kebijakan**

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, diperlukan pergeseran paradigma menuju kebijakan yang lebih fleksibel, inklusif, dan benar-benar mengakar pada kebutuhan nyata masyarakat lokal. Penerapan kebijakan pendidikan yang bersifat kontekstual dan selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, serta geografis masing-masing daerah merupakan salah satu strategi kunci yang mendesak untuk segera diimplementasikan. Kebijakan yang terlalu seragam dan tidak mengakomodasi keberagaman kondisi lokal terbukti tidak efektif dalam menghadapi kompleksitas tantangan pendidikan yang ada di Indonesia (Kusuma, 2024; Tilaar & Nugroho, 2008).

Integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan merupakan solusi strategis lain yang tidak bisa diabaikan dan memerlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), berpotensi meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, memperluas jangkauan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta mendorong lahirnya metode pengajaran yang lebih inovatif dan adaptif. Akan tetapi, keberhasilan penerapan teknologi ini sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan secara simultan dan terencana (Rahayu, 2020; Widiara, 2018).

Peningkatan kualitas tenaga pendidik memegang peranan yang tidak kalah krusialnya dalam ekosistem ini. Sebagai aktor sentral dalam proses pembelajaran, para guru mutlak memerlukan kompetensi yang relevan dan sejalan dengan standar pendidikan nasional yang berlaku. Program pengembangan profesional yang bersifat berkelanjutan bagi tenaga pendidik karenanya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi (Jasiah, 2021). Seiring dengan itu, penguatan tata kelola dan peningkatan efektivitas kebijakan juga perlu diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di semua lini (Raharjo, 2012; Kemendikbudristek, 2022).

Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global juga perlu terus diperkuat dan dimutakhirkan. Kurikulum yang bersifat adaptif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi akan membantu peserta didik membangun keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Jasiah, 2018). Terakhir, sinergi yang solid dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi aktif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas, amat sangat diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, berkeadilan, dan berkelanjutan (Jasiah, 2015).

## KESIMPULAN

Temuan utama dalam penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan politik pendidikan memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di Indonesia, dampak yang dihasilkannya masih sangat tidak merata dan belum dirasakan secara

adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan antarwilayah yang masih menganga lebar, lemahnya mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, serta dominasi kepentingan politik dalam proses perumusan kebijakan merupakan faktor-faktor struktural yang paling determinatif dalam menghambat terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Jasiah, 2014).

Penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan sebelumnya mengenai adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realita implementasinya di lapangan (Tintingon, 2023; Afandi, 2022), tetapi juga menyumbangkan perspektif baru bahwa politisasi kebijakan pendidikan merupakan variabel kritis yang selama ini belum mendapat perhatian yang proporsional dalam diskursus kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, integrasi dimensi politik ke dalam kerangka analisis efektivitas kebijakan pendidikan merupakan kontribusi konseptual yang bermakna dari penelitian ini.

Penelitian ini mengakui keterbatasannya dalam hal cakupan data, mengingat sepenuhnya dibangun atas dasar studi kepustakaan tanpa melibatkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dengan pendekatan campuran (mixed methods) yang memadukan survei lapangan dengan wawancara mendalam bersama para pemangku kebijakan di berbagai daerah akan sangat berharga untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan representatif. Di samping itu, studi komparatif antardaerah dengan kondisi dan kapasitas yang berbeda-beda akan semakin memperkaya pemahaman kita mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan yang terjadi di berbagai pelosok Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analisis kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–89. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.32>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, & Sui-Ni, N. (2023). Peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan pendidikan dasar bermutu untuk

- mewujudkan visi Indonesia 2045. *Papernia: Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research*, 1(1), 16–20. <https://doi.org/10.59178/papernia.202301013>
- Fajriyatur Robi'ah, & Prihantini, P. (2022). Urgensi kualitas pendidik yang sesuai dengan kebijakan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23300>
- Gunawan, R., & Bedi, F. (2024). Menyikapi tantangan pendidikan di Indonesia: Solusi inklusif melalui analisis kebijakan [Manuskrip].
- Hamid, M. A. (2017). Peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi tuntutan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 27–34. <https://doi.org/10.18592/jipmi.v7i2.1590>
- Hasbullah. (2015). Kebijakan pendidikan: Dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Rajawali Pers.
- Jasiah. (2014). Pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat: Kajian terhadap peran lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Tengah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 10(1), 1–18.
- Jasiah. (2015). Manajemen pendidikan Islam: Teori dan praktik di lembaga pendidikan Islam Kalimantan Tengah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 45–62.
- Jasiah. (2016). Kebijakan mutu pendidikan Islam: Analisis terhadap implementasi standar nasional pendidikan di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 23–40.
- Jasiah. (2017). Peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 16(2), 170–182.
- Jasiah. (2018). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi di era globalisasi. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 1–15.
- Jasiah. (2019). Problematika implementasi kebijakan pendidikan karakter di sekolah dasar wilayah Kalimantan Tengah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(1), 53–68.
- Jasiah. (2020a). Analisis kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 18(2), 112–130.
- Jasiah. (2020b). Efektivitas pengawasan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah tsanawiyah. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 34–50.

- Jasiah. (2021a). Peningkatan profesionalisme guru melalui kebijakan sertifikasi: Evaluasi dan tantangan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 25–40.
- Jasiah. (2021b). Transformasi kebijakan pendidikan nasional dalam perspektif manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Edukasi dan Sains*, 3(1), 1–18.
- Jasiah. (2022a). Integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pendidikan nasional: Analisis kritis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 78–95.
- Jasiah. (2022b). Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: Studi terhadap implementasi kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 88–105.
- Jasiah. (2023a). Desentralisasi dan otonomi pendidikan: Peluang dan tantangan bagi lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 21(1), 1–20.
- Jasiah. (2023b). Dinamika politik pendidikan dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 44–62.
- Jasiah. (2024). Evaluasi implementasi standar nasional pendidikan di madrasah: Tantangan dan strategi peningkatan mutu. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 55–72.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Kemendikbudristek.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2772>
- Nugroho, R. (2017). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Prabowo, A. & Heriyanto. (2019). Analisis alokasi anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 87–102. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i2.1244>
- Pratiwi, R. D., & Nurjannah, N. (2023). Pengaruh kepentingan politik terhadap efektivitas kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/jap.v30i1.52145>
- Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511–532. <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>

- Rahayu, S. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 65–74. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3792>
- Salamah, H. N., Amirudin, A., & Sitika, A. J. (2022). Strategi peningkatan mutu pendidikan Islam di madrasah ibtidaiyah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i2.7043>
- Salim, A. & Haryanto. (2019). Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia: Analisis kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i2.1268>
- Sari, S. P., Ritonga, R. R., & Sirait, B. A. (2023). Penerapan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(5), 181–193. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i5.146>
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173>
- Siahaan, S. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Teknodik*, 24(2), 101–112. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v24i2.660>
- Siskasari, W. (t.t.). Analisis kebijakan dan kekuasaan dan implementasinya terhadap pendidikan di Indonesia [Manuskrip].
- Suyana, N. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global: Sebuah analisis strategis dan prioritas [Manuskrip].
- Swandi, C., Khair, A. A., Hajar, R. S., & Muslimin, A. A. (2025). Analisis kebijakan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah [Manuskrip].
- Tanti Rizkya, R., Suharyati, H., & Fakhruddin, N. H. P. (2025). Kebijakan pendidikan di Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 14(3), 342–356. <https://doi.org/10.26877/jmp.v14i3.23835>
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Pustaka Pelajar*.

- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik (Ed. 2). Bumi Aksara.
- Widiara, I. K. (2018). Blended learning sebagai alternatif pembelajaran di era digital. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v2i2.68>.